

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI
PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH PERKOTAAN (*MUNICIPAL
WASTE RECYCLING MANEGEMENT PROGRAM/MWRP*) KABUPATEN
GOWA**

Disusun Dan Diusulkan Oleh:

ALI IMRAN. M

105641101117



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI
PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH PERKOTAAN (*MUNICIPAL*
***WASTE RECYCLING MANEGEMENT PROGRAM/MWRP*) KABUPATEN**
GOWA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

ALI IMRAN. M

105641101117

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

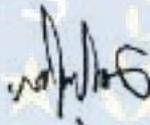
2023

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0161/FSP/A.4-II/VII/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di makassar pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2023.

Mengetahui:

Ketua



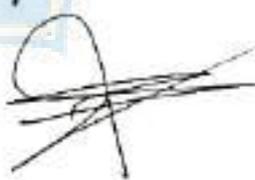
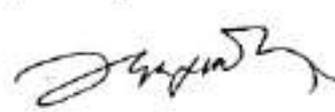
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730772

Sekretaris



Andi Iuhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 092797

Tim Penguji:

1. Drs. H. Ansyari Mone, M. Pd (Ketua) ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M. Si ()
3. Dr. Haerana, S. Sos., M Pd ()
4. Rudi Hardi, S. Sos., M.Si ()

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recycling Management Program/MWRP*) Kabupaten Gowa

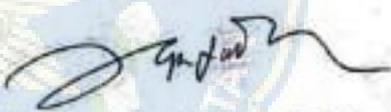
Nama Mahasiswa : Ali Imran. M
Nomor Induk Mahasiswa : 105641101117
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Fatmawati, M. Si

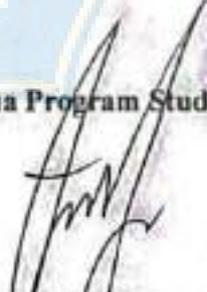

Dr. Haerana, S.Sos., M. Pd

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ibhani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ali Imran. M

Nim : 105641101117

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Penelitian dengan judul “Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui program daur ulang sampah perkotaan (*municipal waste recycling management program/MWRP*) Kabupaten Gowa” adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 24 Juli 2023

Ali Imran. M

ABSTRAK

Ali Imran. M 2023. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recyclng Management Program*) Kabupaten Gowa. (Dibimbing oleh Fatmawati dan Haerana)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui program daur ulang sampah perkotaan (*municipal waste recyclng manegement program*) Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif .Adapaun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara,observasi, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang. Hasil Pada Penelitian ini menunjukkan. 1) Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan melalui program(*Municipal Waste Recyclng Management Program*) telah membangun hubungan yang baik terhadap masyarakat dengan memberikan arahan serta sosialisasi terkait pelaksanaan program tersebut. 2) Peran Informasional Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah melalui program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recyclng Management Program*) menginformasikan mengolah sampah dengan beberapa tahap sampai pada tahapan daur ulang yang kemudian dapat di jadikan Kembali barang bernilai dan dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat. 3)Peran Pengambilan Keputusan untuk mengatasi permasalahan sampah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menekan angka peningkatan sampah yang bermuara pada tempat pembuangan akhir (TPA) Pemerintah Kabupaten gowa melalui program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recyclng Management Program*) dengan melakukan pemisahan jenis sapah kemudian mendaur ulang sampah yang dapat diolah kembali oleh masyarakat sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Peran, Pengelolaan Sampah, *Municipal Waste Recyclng Management Program*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui program daur ulang sampah perkotaan (*municipal waste recycling management program*) Kabupaten Gowa**“ yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Mansur dan Ibunda Marwa Kebo senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa amrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa

mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M. Si selaku pembimbing I (satu) dan Ibu Dr. Haerana, S. Sos., M. Pd selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa serta Jajarnya , serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.HI
6. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan mendampingi penulis disegala kondisi.

7. Teman-teman IP 017 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman kelas IP A yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 24 Juli 2023

Ali Imran. M

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KE ASLIAN KARYA ILMIA	v
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	10
2. Konsep Peran	18
3. Konsep Pengelolaan Sampah.....	22
4. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah	25
C. Kerangka Fikir.....	31
B. Fokus Penelitian	32
C. Deskripsi Fokus Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis & Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39

B.	Hasil Penelitian.....	47
C.	Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....		61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Keberadaannya tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik karena pengelolaan sampah yang tidak saniter dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan gangguan pada kesehatan manusia. Sampah masih menjadi masalah di Indonesia karena pelayanan yang dilakukan saat ini masih relatif terbatas (Sumantri, 2015). Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan sampah dengan baik (Hasbullah, Taufik, and Nurmaini 2019).

Persampahan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah, disamping produk utama yang diperlukan sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbang antara produksi sampah dengan pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum memadai. Pengelolaan sampah berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan di dalam UU

maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Dimana pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah (Prihatin 2020).

Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih berpegang pada prinsip 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Maksudnya, sampah dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian diangkut secepat-cepatnya dan dibuang sejauh-jauhnya. Sampah masih dianggap sebagai sisa hasil kegiatan manusia yang tidak memiliki nilai dan harus segera dijauhkan atau dibuang serta jika perlu dimusnahkan (Kuncoro, 2009). Pengelolaan sampah dengan menggunakan paradigma 3P memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan TPA (Wibowo, 2009) karena dalam pengelolaan sampah dengan model 3P tidak ada proses pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya. Akibatnya dibutuhkan sarana angkut sampah yang banyak dan lahan TPA yang luas. Tidak hanya itu, penanganan sampah di TPA menjadi lebih berat dan dibutuhkan biaya yang besar untuk menanganinya. TPA dengan sistem lahan urug saniter yang ramah lingkungan terbukti tidak ramah dalam aspek pembiayaan, karena membutuhkan biaya tinggi untuk investasi, konstruksi, operasi, dan pemeliharannya. Pemerintahan Indonesia mengesahkan UU Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum nasional bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah. UU tersebut memerintahkan pemerintah daerah untuk menutup semua TPA yang dioperasikan sebagai pembuangan sampah terbuka (open dumping) dalam jangka waktu maksimal 5 tahun atau sampai 2013. Dalam rentang waktu yang sama, TPA baru akan dibangun untuk menggantikannya. Pembangunan tempat pembuangan

sampah baru harus memakai sistem sanitary landfill sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Meidiana dan Gamse (2011) mengidentifikasi bahwa sebagian besar TPA dioperasikan sebagai TPA open dumping terkontrol, sekalipun tempat pembuangan sampah tersebut rata-rata awalnya didesain sebagai sanitary landfill (Munawar & Fellner, 2014). Sebagai konsekuensinya praktik ini antara lain menimbulkan emisi lindi yang mengandung polutan organik dan kandungan nitrogen serta gas rumah kaca (greenhouse gases atau GHG). Menurut UU Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 ayat (5), disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah berdasarkan UU Pengelolaan Sampah tidak lagi bertumpu pada pendekatan akhir seperti yang dilakukan selama ini. UU Pengelolaan Sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sehingga pengelolaannya dilakukan mulai dari hulu. Oleh karenanya, pengurangan sampah dari sumber menjadi hal utama dalam pengelolaan sampah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU Pengelolaan Sampah, kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle).

Diperlukan manajemen lingkungan yang baik untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang kompleks. Lingkungan adalah entitas dinamis yang dapat terpengaruh oleh campur tangan manusia, sehingga terjadi penurunan kualitas

lingkungan. Permasalahan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Oleh karena itu, solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Gowa mengatasi masalah sampah melalui pengelolaan sampah Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recyclling Management Proqram*) bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas pengelolaan sampah pemerintah daerah di Kabupaten Gowa dengan menggunakan pengalaman dan praktik terbaik dari Kota Makassar. Program ini belajar dan mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar. Pendekatan pengelolaan sampah di Kota Makassar dijadikan acuan untuk mendukung kolaborasi masyarakat-pemerintah-swasta yang lebih inklusif di Kabupaten Gowa.

Program ini juga mendukung bank sampah yang sudah ada dan memfasilitasi pembentukan bank sampah percontohan baru di tingkat masyarakat untuk membangun partisipasi masyarakat yang lebih luas, khususnya perempuan dan pemuda dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, program ini tidak hanya mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah, tetapi perubahan positif dalam pengelolaan sampah Kota Makassar juga diharapkan dapat tercapai di Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan program ini juga merupakan perwujudan amanat Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa "sampah merupakan permasalahan nasional yang pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan

manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah yang komprehensif memerlukan kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha .

Tujuan utama program ini berupaya dalam pengurangan sampah dari sampah rumah tangga dengan melibatkan masyarakat di dalamnya agar dapat memilah sampah yang memiliki nilai ekonomi sehingga selain dapat mengurangi jumlah sampah dapat juga menjadi salah satu pendapatan yang di peroleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui program daur ulang sampah perkotaan (*municipal waste recycling management program*) Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang maka Rumusan pada penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recycling Management Program*) Kabupaten Gowa

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recycling Management Program*) Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

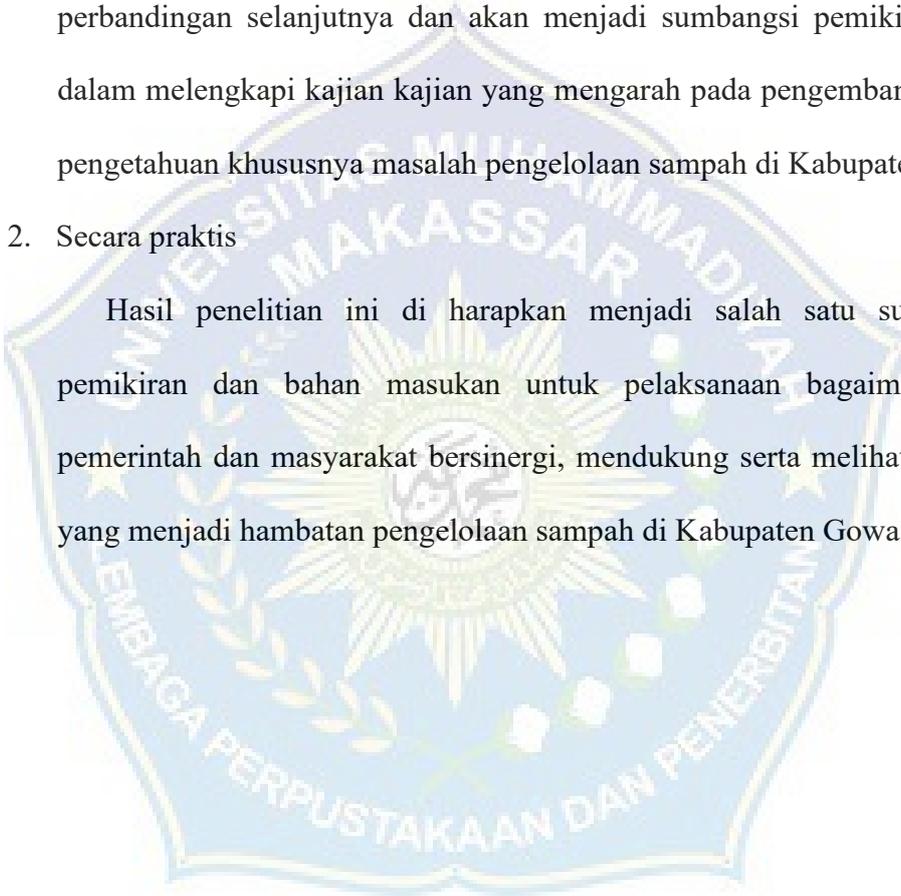
Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat di jadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi, mendukung serta melihat apa saja yang menjadi hambatan pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian hingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya

Tabel Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	(Halim & Feriadi, 2022)	Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Daur Ulang pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu “Mulyoagung Bersatu” Kabupaten Malang	Hasil penelitian ini menggambarkan proses inovasi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) Mulyoagung Bersatu mampu membuktikan bahwa inovasi daur ulang sampah yang dikelola dengan manajemen yang professional mampu menyelesaikan timbulan sampah hingga 250 m ³ /hari dengan jumlah layanan sebanyak 12.000 KK dengan jangkauan layanan adalah desa mulyoagung, desa landungsari, desa sumbersekar, keurahan dadaprejo dan desa gadingkulon Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Proses pemilahan menghasilkan 31 jenis sampah bernilai ekonomi dan mampu mengolah sampah organic menjadi pupuk kompos dan pakan ternak. Aktivitas inovasi daur ulang sampah ini berhasil mengurangi residu sampah yang dibuang ke TPA hingga 88% dari sampah yang dikelola atau sebanyak 220m ³ /hari. Keberadaannya menjadi tujuan edukasi peran serta masyarakat

			dalam menyelesaikan persoalan sampah dalam suatu wilayah dan menginspirasi orang lain untuk dapat mereplikasi inovasi ini
(Pasande & Ezra, 2021)	Daur Ulang Sampah di Desa Paisbuloli Sulawesi Tenggara		Problem sampah berawal dari aktifitas pembuangan dan pembakaran di tempat pembuangan sampah sementara. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberi pembelajaran kepada masyarakat cara mengelola sampah menjadi baju plastik, sampah ditukar dengan sampah, sampah ditukar dengan sayur, tas daur ulang, eco brick ditukar dengan telur, paving blok, dan lukisan dari kantong plastik bekas. Cara yang digunakan untuk pengelolaan sampah yakni: mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, menanam kembali, dan menggantikan. Pengabdian masyarakat menghasilkan hal penting yakni, tetap mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengelola sampah. perlu melibatkan perangkat desa untuk menggerakkan masyarakat mengurangi sampah. Serta adanya pelatihan bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dari daur ulang sampah.
(Hartono, Widiasih, & Mary, 2020)	Analisis Inovasi Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi		hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) inovasi bank sampah memiliki telah diarahkan dan dilaksanakan dengan baik, 2) kendalanya adalah kurangnya modal untuk operasional, kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah inti pengelolaan sampah rumah tangga, dan tidak semua orang sadar untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan sampah, dengan menggunakan waktu, tempat, dan pola pikir pemulung sebagai alasan. Ketiga upaya tersebut adalah:

		<p>1) Undangan PBSB untuk lebih banyak CSR lingkungan, 2) berkelanjutan sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang pengelolaan sampah ramah lingkungan, dan 3) terobosan inovasi pada pengelolaan sampah. Disarankan modul pembuatan kompos dan biopori harus dijadikan pedoman masyarakat dan bank sampah itu Kampanye 3R dapat didukung secara finansial oleh pemerintah.</p>
--	--	--

Berikut perbedaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

Pada Penelitian Halim & Feriady (2020) Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Daur Ulang pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu “Mulyoagung Bersatu” Kabupaten Malang menjelaskan tentang Inovasi daur ulang sampah yang dikelola dengan manajemen profesional dengan mampu menyelesaikan timbangan sampah di beberapa desa dan memilih sebanyak 31 sampah yang bernilai ekonomi serta mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan pakan ternak.

Pada Penelitian Pasande & Ezra (2021) Daur Ulang Sampah di Desa Paisbuloli Sulawesi Tenggara menjelaskan tentang Pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pelajaran kepada masyarakat cara mengelola sampah menjadi beberapa olahan dan barter dengan tujuan dapat mengurangi penggunaan secara berulang, mengaur ulang sampah serta mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam pengelolaan sampah.

Pada penelitian (Hartono, Widiasih, & Mary, 2020) Analisis Inovasi Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan

Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi menjelaskan tentang evaluasi inovasi bank sampah dengan menunjukkan bahwa inovasi berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam hal kekurangan modal oprasional serta kurangnya pemahaman masyarakat.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang kan peneliti lakukan yaitu tarletak pada focus penelitian dimana pada penelitian ini peneliti berfokus pada Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recyelling Management Proqram*) Kabupaten Gowa

B. Kajian Teori

Teori merupakan sarana berpikir yang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami variabel-variabel yang diteliti dan solusi teoritisnya, maka untuk memberikan arah penelitian diperlukan suatu teori yang mendukung arah permasalahan. Menurut Kodoatie (2003:219) secara umum persoalan yang muncul pada pengelolaan sampah di daerah adalah sebagai berikut:

1. Konsep Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan publik (*public service*) di Indonesia seringkali disamakan dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dimana dikatakan bahwa ada empat unsur dalam

pelayanan publik, (Bharata, 2004) yaitu : 1) Penyedia layanan; 2) Penerima layanan; 3) Jenis layanan; 4) Kepuasan pelanggan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI 1998) memberi definisi bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Departemen Dalam Negeri (2004) memberi batasan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat berupa barang dan/ atau jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena itu merupakan hak dari setiap warga negara karena dijamin oleh undang undang dan kepada pelayanan publik wajib untuk melakukannya (Riani , 2021).

b. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Berdasarkan Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan

tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

- 1) Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, dan lain sebagainya.
- 2) Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit ataupun individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (fisik) misalnya pelayanan listrik, air bersih dan pelayanan telepon.
- 3) Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran (Bazarah, Jubaidi, & Hubaib).

c. Karakteristik Pelayanan Publik

Pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan dimana karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan dan penampilan kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perumusan karakteristik yang dibuat oleh para ahli. Zeithaml, Berry dan

Parasuraman (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003: 27) mengidentifikasi lima karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu:

- 1) Bukti langsung (*tangible*) adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari segi visual (berhubungan dengan lingkungan fisik). Tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan aspek tangible ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan. Aspek tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- 2) Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Reliability berarti perusahaan menepati apa yang dijanjikan, baik mengenai pengantaran, pemecahan masalah, dan harga. Reliabilitas meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja (*performance*) dan sifat dapat dipercaya (*dependability*). Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal, memenuhi janjinya secara akurat dan andal, menyampaikan data secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat.
- 3) Daya tanggap (*responsiveness*), dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Beberapa contohnya adalah ketepatan waktu pelayanan, kecepatan memanggil kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat. Dimensi ini menegaskan perhatian dan kecepatan waktu dalam hubungannya dengan permintaan pelanggan, pelayanan, komplain dari masalah yang terjadi.
- 4) Jaminan (*assurance*), Jaminan yang dimaksud adalah perilaku karyawan atau petugas pelayanan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya.

Jaminain juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menanggapi setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. Jaminan ini mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

- 5) Empati, berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Empati dalam pelayanan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan (Bazarah, Jubaidi, & Hubaib).

d. Jenis Jenis Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang wajib diberikan oleh pemerintah diklasifikasikan dalam dua kategori, pemerintah sebagai penyelenggara layanan juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Mengingat kebutuhan dan masalah masyarakat yang berbeda-beda, maka jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga berbeda. Organisasi publik hendaknya memperhatikan kriteria-kriteria pelayanan publik yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 yang terdapat pengelompokan pelayanan umum ke dalam tiga bagian yaitu: (1) Kelompok Pelayanan Administrasi, (2) Kelompok Pelayanan Barang, dan (3) Kelompok Pelayanan Jasa.⁴¹ Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- 1) Pelayanan Barang, ialah jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk atau produk barang yang dapat digunakan oleh publik, seperti tenaga listrik, air bersih, e-KTP, dan lain-lain.
- 2) Pelayanan Jasa, ialah jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk jasa yang dibutuhkan oleh public, seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain-lain.
- 3) Pelayanan Administratif, merupakan jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti akta kelahiran, identitas kewarganegaraan, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Sebagai pelayan publik, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang prima kepada setiap masyarakat tanpa perbedaan. Jenis pelayanan yang ditawarkan kepada warga dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan warga, namun manajemen penyelenggaraan layanan tersebut harus didasarkan pada prinsip dan nilai yang sama.

e. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

- 1) Penyedia layanan, ialah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu pada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa.
- 2) Penerima layanan, ialah konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.

- 3) Jenis layanan, ialah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- 4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan.

f. Asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. Sehingga pelanggan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Tujuan dari pelayanan publik secara teoritis ialah dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tingkat kepuasan tersebut pemerintah dituntut untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang profesional, ada beberapa azas-azas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain:

- 1) Transparansi, ialah keterbukaan dan kemudahan akses untuk seluruh lapisan masyarakat dan disediakan dengan mudah dipahami serta memadai.
- 2) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi layanan dan penerima dengan tetap berpedoman terhadap prinsip efisiensi dan efektivitas.

- 4) Partisipatif, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara memperlihatkan aspirasi, kebutuhan dan bagaimana harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak, yaitu tidak adanya diskriminatif semua diberikan pelayanan secara profesional dan tidak memihak baik secara ras, suku, gender dan kelas social.
- 6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang terdiri dari 12 azas:

- a) Azas kepentingan umum
- b) Azas kepastian hukum
- c) Azas kesamaan hak
- d) Keseimbangan hak dan kewajiban
- e) Azas keprofesionalan
- f) Azas partisipatif
- g) Azas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- h) Azas keterbukaan
- i) Azas akuntabilitas
- j) Azas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k) Azas ketepatan waktu
- l) Azas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pelayanan publik akan berkualitas apabila memenuhi azas-azas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketetapan waktu dan kemudahan.

2. Konsep Peran

a. Pengertian Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Peran menurut Abdilsyani (2012 :92) peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peran. Selanjutnya dia menambahkan bahwa peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2012:212), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya. Dari sudut pandang yang lain, peran adalah tindakan yang di lakukan seseorang atas

sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Power wadarminta,1995) (Raintung, Sambrian, & Sumampow, 2021).

b. Aspek-aspek Peran

Soekanto (1987:221). mengemukakan Aspek-Aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

c. Unsur-unsur Peran

Menurut Soerjono Soekarno unsur-unsur peran ialah aspek dinamis dari kehidupan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial pemegang kehidupan, Bagian dari aktivitas yang dinamakan seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peran-peran individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

d. Fungsi Peran

Peran memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memberi arah pada sosialisasi
2. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma serta pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok masyarakat

4. Menghidupkan system pegendalia dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

e. Jenis-Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu peranan tertentu.
- 6) Model peranan (Role Model) yaitu dimana tingkah laku seseoorang yang dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya.

f. Indikator Peran

Menurut Henry Mintzberg (1998), yang melakukan penelitian seksama terhadap lima orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan

observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa seseorang melakukan sepuluh peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat. kesepuluh peran ini bisa dikelompokkan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan pengambilan keputusan.

- 1) Peran Antarpersonal Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal adalah peran penghubung. Mintzberg (1998), mendeskripsikan aktivitas ini sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi dari manajer pengendalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.
- 2) Peran Informasional Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin

direncanakan oleh para pesaing, dan sebagainya. Mintzberg (1998), menyebut hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.

3) Peran Pengambilan Keputusan

Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri (Suhartani, 2020).

3. Konsep Pengelolaan Sampah

Menurut Azwar (1990:53), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Kodoatie (2003) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal

yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup. Menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik.

Menurut Hadiwiyoto (1983), berdasarkan lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar
2. sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai.

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan. Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya berarti tidak adanya sampah, melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama dan yang harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah, yaitu: identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada; definisi baik dan benar dalam hal pengelolaan sampah; dan pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Suryani, 2014).

Penggolongan sampah menurut sumbernya adalah :

1. Sampah domestik, sampah ini berasal dari lingkungan pemukiman atau perumahan
2. Sampah komersil, sampah yang dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, restoran, rumah makan, warung, pasar dan swalayan
3. Sampah industri, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri
4. Sampah alami dan lainnya, dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan sebagainya.

Berdasarkan sifatnya sampah dapat digolongkan menjadi:

1. Sampah yang mudah membusuk
2. Sampah yang tidak mudah membusuk
3. Sampah yang mudah terbakar
4. Sampah yang tidak mudah terbakar.

Tipe pengelolaan sampah Pada dasarnya terdapat 2 macam pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan / penanganan sampah setempat (individu) dan pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan permukiman atau kota. Penanganan setempat adalah penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh sipenghasil sampah. Sedangkan pengelolaan secara terpusat, khususnya dalam teknis operasional, adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir. Jika yang akan dilaksanakan adalah sistem penanganan yang terpusat, maka adanya suatu institusi yang menangani langsung pengelolaan persampahan mutlak diperlukan. Institusi dalam sistem pengelolaan

persampahan memegang peranan yang sangat penting meliputi, status, struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi vertikal maupun horisontal dari badan pengelola. Sesuai dengan status kota, untuk kota metropolitan dan kota besar, bentuk badan pengelola sebaiknya suatu “Dinas” tersendiri dan selanjutnya dikembangkan menjadi bentuk Perusahaan Daerah”. Kotamadya sebaiknya merupakan Dinas tersendiri sedangkan Kota Administratif sebaiknya merupakan Suku Dinas Kebersihan atau UPTD dibawah Dinas Kebersihan atau Dinas PU Kabupaten. Ibu Kota Kabupaten sebaiknya merupakan UPTD dibawah Dinas PU/Dinas Kebersihan Kabupaten atau Seksi dibawah Dinas PU Kabupaten. (Manual sistem pengelolaan sampah perkotaan (Prihatin 2020).

4. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut Fiona (2001:416), pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga donor. Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pengatur Kebijakan (Regulator) Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto (1997:15). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.
- b. Penyedia Layanan (Service Provider) Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak

hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kebijakan yaitu salah satunya program. Menurut EPA, program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program-program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir (Jati, 2013).

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

5. Pengelolaan Sampah Daur ulang

Prinsip Reduce (R1) Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien dan sedikit sampah. Namun, diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut. Perubahan perilaku tersebut dapat diterapkan sejak anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Prinsip Reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Prinsip Reuse (R2) Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan) seperti menggunakan kertas bolak-balik menggunakan Kembali botol bekas minuman untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain.

Prinsip Recycle (R3) berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas lebih rendah dan lain-lain.¹² Contoh lain yang dapat dilakukan siswa adalah Misalnya, bubur kertas untuk membuat alat peraga meletusnya gunung api. Prinsip Recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barangbarang yang sudah tidak berguna lagi, bisa

didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain (Arisona, 2018).

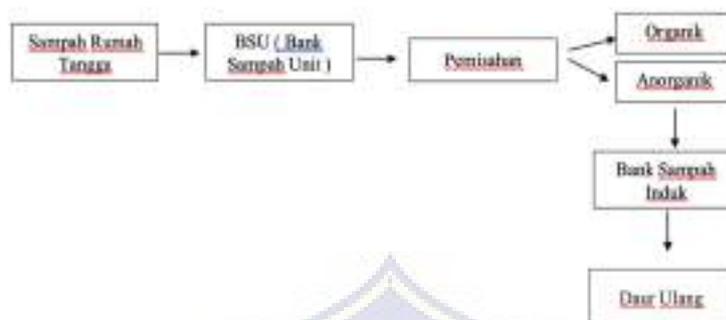
6. Pengelolaan sampah daur ulang MWRP Kabupaten Gowa

MWRP merupakan Program dari USAID yang bertujuan untuk mengurangi sumber pencemaran plastik laut di empat negara Asia yang termasuk pencemar terbesar: Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Melalui hibah dan bantuan teknis kepada organisasi yang memenuhi syarat, MWRP telah memperkenalkan pendekatan pengelolaan limbah padat (*Solid Waste Management/SWM*) yang inovatif dan terukur dan meningkatkan investasi daur ulang sampah di kota-kota pesisir, dengan mendukung bisnis lokal, asosiasi wanita, kota/kabupaten, dan lainnya untuk mengurangi polusi plastik laut.

MWRP memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lokal untuk secara efektif mengelola limbah padat dan memperluas daur ulang melalui mekanisme yang mempromosikan inklusi sosial, memberdayakan perempuan dan kaum muda, mendukung pemulung independen, dan menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten gowa memanaajemen Pengelolaan sampah perkotaan melalui Program MWRP melalui dinas Lingkungan hidup dan bekerja sama dengan Yayasan penduli Negri (YPN) sebagai Langkah tepat untuk membangun lingkungan bersih ,hijau dan sehat. Program ini juga mendukung peraturan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah yang teruang dalam Kebijakan dan strategi Daerah (Jakstada) tentang pengelolaan Sampah Rumah tangga .

Berikut Ilustrasi Pengelolaan Sampah Daur Ulang MWRP Kabupaten Gowa



Gambar I
Pengelolaan sampah daur ulang

Berdasarkan Gambar diatas dapat pengelolaan Sampah rumah tangga di Kabupaten Gowa mellibatkan langsung masyarakat sehingga mempermudah pemerintah dalam pengelolaan daur ulang. Pemerintah membentuk BSU di masing masing kelurahan kemudian masing-masing dari kelurahan mengumpulkan sampah rumah tangga nya kemudian dipilih dan di bawa ke Bank Sampah Induk dan di lakukan daur ulang.

C.Kerangka Fikir

Kerangka fikir adalah menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk pembatasan fokus penelitian berkaitan dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian tentang Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (*Municipal Waste Recyclng Management Proqram/MWRP*) Kabupaten Gowa

C. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peran Antarpersonal yaitu peran pemerintah dalam dalam ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang seremonial sehubungan dengan pengelolaan Sampah melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclng Management Proqram/MWRP Kabupaten Gowa
2. Peran Informasional yaitu Peran Pemerintah dalam memberikan atau memperoleh informasi dalam menjalankan Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclng Management Proqram/MWRP Kabupaten Gowa
3. Peran Pengambilan Keputusan yaitu Peran Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclng Management Proqram/MWRP Kabupaten Gowa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian ini berlangsung selama 2 bulan setelah pelaksanaan ujian proposal. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

B. Jenis & Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian, sehingga dengan demikian peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari fenomena yang terjadi ditempat penelitian.

Alasan peneliti memilih desain penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi/kejadian sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan suatu gambaran dan melakukan pengamatan dari sebuah penelitian dengan cara pengumpulan data sebanyak mungkin. Begitu juga dengan penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui

Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycling Management Program) Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Dibawah ini penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber yang dianggap berpotensi memberikan informasi sebenar-benarnya. Contoh data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, media online dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topic yang diteliti serta data yang diperoleh dari bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Komunikasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa

dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan informan yang tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pediman atau

tempat, namun berdasarkan pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan penelitian ini. Maka dari itu, adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Gambar 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Handry Alfa, S.IP	Kepala dinas UPT Bank Sampah
2	Mei Rezky A.Md Kep	Anggota Dinas UPT Bank Sampah
3	Dg Ngagi	Pekerja
4	Dg Senna	Pekerja
5	Dg ngempo	Pekerja

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun yang berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclng Management Proqram) Kabupaten Gowa.”

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer tentang penelitian yang di butuhkan dalam Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclng Management Program) Kabupaten Gowa.”

3. Dokumentasi

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclng Management Program) Kabupaten Gowa.”

F. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan-keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di dinas lingkungan hidup yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2012) berpendapat bahwa dari keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

1. Reduksi data

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data adalah suatu proses pemilihan data penyederhanaan, pengabstrakan data dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun untuk memungkinkan terdapatnya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian agar kita dapat memahami apa yang tengah terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.

Maka dari itu, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah kalau persyaratan validitas, rehabilitasi, dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam (Purrohman, Universitas, and Prof 2018) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji

kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdian), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera). Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero. Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng

Imannuntungi Karaeng Tumapa'risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje'ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa'risi Kallonna tersebutlah nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo.

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum'at untuk pertama kalinya. Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur. Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di

Buton. Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC. Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya. Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa

a. Profil Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Gowa dalam urusan lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Gowa. Sebagai Kabupaten yang memiliki daya saing dengan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, maka Dinas Lingkungan Hidup dibutuhkan untuk mendukung Bupati Gowa dalam menjamin kelestarian lingkungan dengan memperhatikan Azas Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa bertempat di Jl. Mangka dg Bombong No. 29, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Azhari azis, AP., MM sebagai Kepala Dinas.

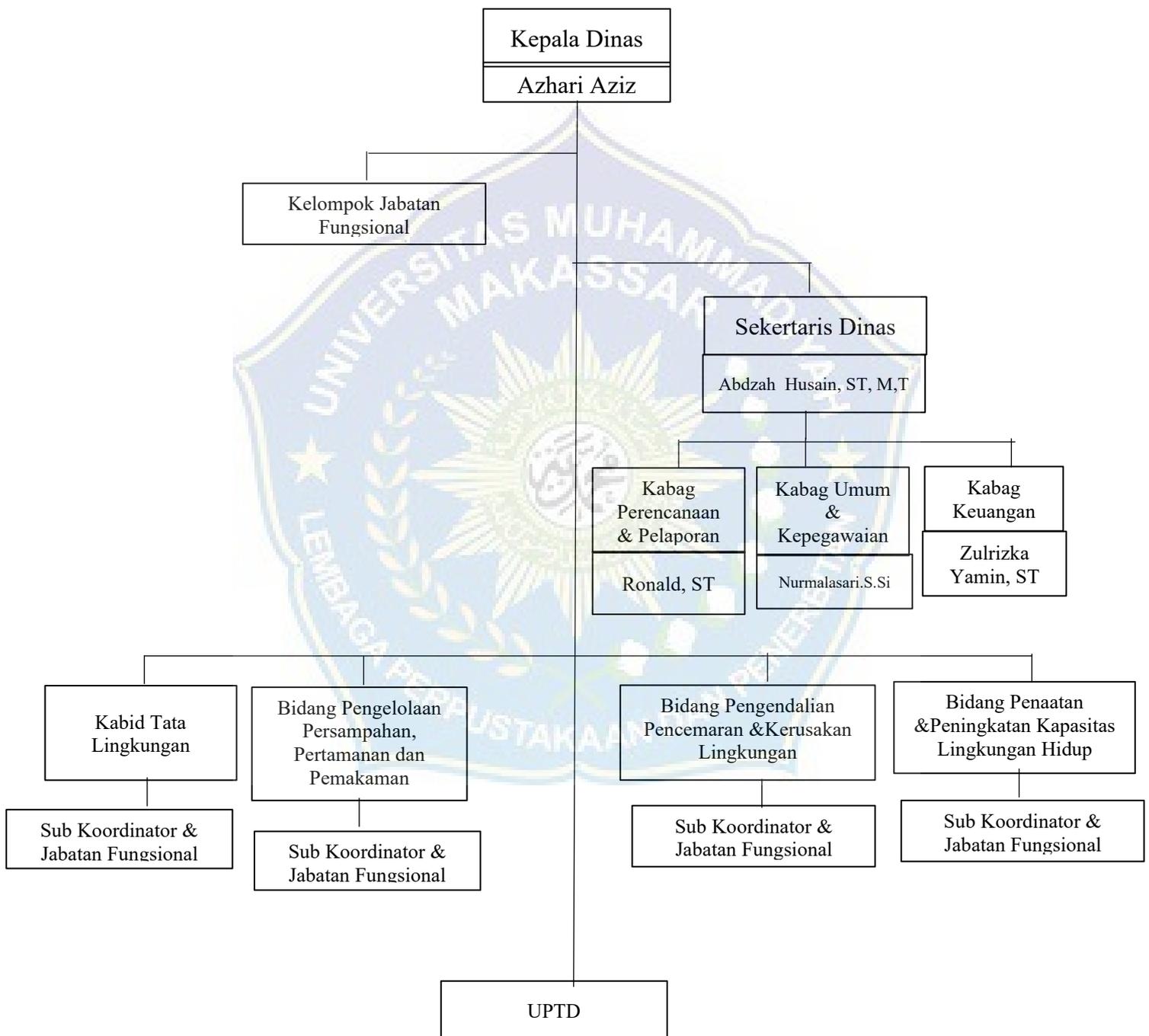
b. Visi Misi Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa

Visi dan Misi Organisasi Visi : Penggerak Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Misi : Meningkatkan Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa



3. Gambaran Umum UPT Bank Sampah Kabupaten Gowa

a. UPT Bank Sampah Kabupaten Gowa

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

b. Visi Misi Bank Sampah Kabupaten Gowa

Visi pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu:
“Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan Tangguh dengan dengan tata Kelola pemerintahan yang terbaik”

Misi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
- 2) Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.

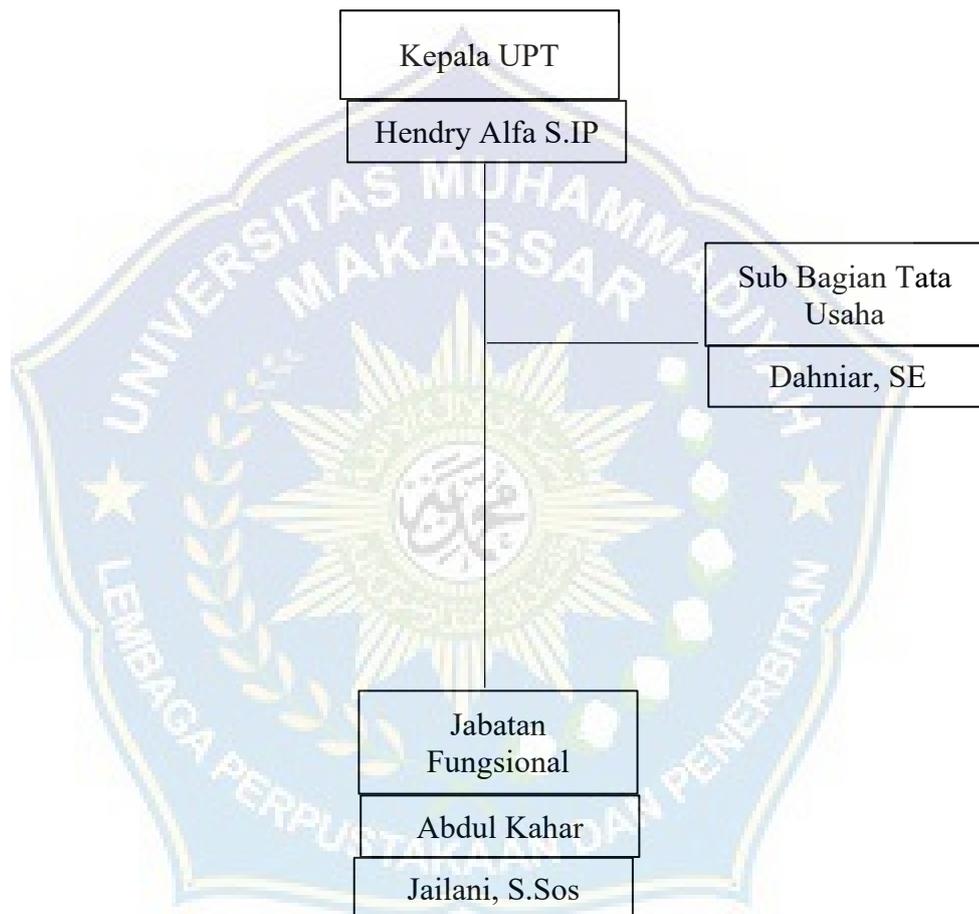
- 3) Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- 4) Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.



c. Struktur organisasi Bank Sampah Kabupaten Gowa

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa



B. Hasil Penelitian

Peran pemerintah merupakan salah satu kunci sukses bagi keberhasilan seluruh organisasi. Dalam meningkatkan kinerja pegawai sangat menentukan dalam mengarahkan sikap dan perilaku pribadi seseorang untuk dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi. Suatu ungkapan betapapun canggih suatu peralatan kerja, tersedianya biaya serta prosedur kerja namun jika anggota organisasi berperilaku tidak sesuai misi organisasi maka akan berakibat pada gagalnya pencapaian tujuan organisasi. Disinilah letak pentingnya faktor manusia dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Oleh sebab itu pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus di bina, di arahkan serta di tingkatkan kemampuannya untuk memperlancar tugas dan pekerjaannya.

Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah dan hingga kini masih membutuhkan pembenahan serta perhatian serius , termasuk pula dari masyarakat.

Dalam melaksanakan program pemerintah, termasuk program penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan seharusnya tidak hanya semata-mata pemerintah yang mengimplementasikannya. Tetapi juga dibutuhkan peran masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.

Adapun teori yang digunakan untuk melihat Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan

(Municipal Waste Recyclng Management Proqram Kabupaten Gowa” ialah dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Siagian, dimana untuk melihat peran dari seorang pimpinan dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni peran Antar Personal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan.

1. Peran Antarpersonal

Gambaran yang dihubungkan dengan peran ini yaitu status dan otoritas pemimpin, dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antar pribadi. Aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam peranan ini antara lain kegiatan-kegiatan seremonial sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pemimpin. Karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka eksesnya pemimpin tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar.

Peranan sebagai pemimpin (leader), Menurut Thoha (2006 : 13) dalam peranan ini pemimpin melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi – fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan. Sejumlah kegiatan yang memperhatikan peranan pemimpin ini termasuk pula merekrut, melatih, mengarahkan, memberi pujian, memberi kritik, mempromosikan, dan memberhentikan. Dalam organisasi informal biasanya pemimpin diikuti karena mempunyai kekuasaan karismatik atau kekuasaan fisik. Adapun dalam organisasi formal, pemimpin yang diangkat dari atas, sering kali tergantung akan kekuasaan yang melekat pada jabatannya tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu: Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pola pengelolaan sampah di diantaranya dengan pembentukan Bank Sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik merupakan bentuk penerapan manajemen ekosentris.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa yang merupakan satuan instansi dalam pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dimana suatu instansi yang berfungsi dalam urusan lingkungan hidup. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintah, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tentunya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah kabupaten Gowa memiliki berbagai peran, diantaranya dalam peran

interpersonal. Gambaran yang dihubungkan dengan peran ini yaitu status dan otoritas pemimpin, dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antar pribadi. aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam peran ini antara lain kegiatan-kegiatan seremonial sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pemimpin. Karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka eksesnya pemimpin tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar.

Dalam peran ini peran kepala dinas UPT Bank sampah menjalankan perannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat legal dan social.

Hasil wawancara bersama HA sebagai kepala Dinas UPT Bank Sampah

“Tentunya dalam menjalankan tugas selain harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku juga perlu membangun hubungan yang baik kepada pegawai lain sehingga dapat mengurangi miskom antara kepala dinas dan juga pegawai dan juga kepada masyarakat berkaitan dengan Pengelolaan Sampah (Mwrp) Kab Gowa ini berkaitan dengan tugas atau peran saya sebagai kepala dinas yang menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku pengelolaan sampah dengan system MWRP sendiri itu merupakan program yang di rancang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan juga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat “. (wawancara pada 6 Maret 2023)

Selanjutnya hal serupa di sampaikan MR Anggota Dinas UPT Bank Sampah

“Kalo berbicara soal peran kepala dinas secara interpersonal sejauh ini sangat memotivasi pegawai lain dan dalam memberikan arahan pun mudah untuk kami pahami “(wawancara pada 6 Maret 2023)

Berikut hasil wawancara bersama DN Masyarakat Kabupaten Gowa

“Menurut saya sebagai masyarakat dan juga terlibat dalam proses daur ulang arahan yang di berikan kepada kami itu sangat bagus yah dan juga kami tidak ada rasa tertekan dalam melakukan pekerjaan malahan kami senang.” (wawancara pada 6 Maret 2023)

Wawancara Bersama DS Masyarakat Kabupaten Gowa

“Alhamdulillah kalo dalam memberikan arahan kepada kami sangat bagus dan para pegawai juga kadang ikut juga dalam membantu kami dalam pemisahan sampah yang akan di olah kembali” (wawancara pada 6 Maret 2023)

Wawancara bersama DNO Masyarakat Kabupaten Gowa

“Pekerjaan yang kami lakukan di sini bukan hanya kita pekerja saja tapi dari dinas lingkungan juga ada yang mengarahkan dan bahkan turut membantu”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam indicator Peran antar personal dinas Lingkungan kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah melibatkan masyarakat dengan memberikan intruksi yang mudah dipahami masyarakat bahkan turut ikutr serta dengan masyarakat dalam proses pemilihan sampah.



Gambar1
Proses Pemisahan Sampah

2. Peran Informasional

Pemimpin melakukan hubungan-hubungan keluar untuk mendapatkan informasi dari luar organisasinya. Informasi didapatkan dan dikumpulkan oleh

pemimpin perusahaan yang kemudian di bagikan kepada karyawannya. Menjadikan pemimpin sebagai pusat informasi bagi organisasinya.

pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, penanganan sampah masih bertumpu pada pemerintah terlihat masih rendahnya kesadaran dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Potensi sampah juga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat yang sebenarnya merupakan potensi usaha bagi masyarakat dengan pengolahan yang tepat guna sesuai potensi dan kegunaan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah penumpukkan sampah yang selama ini memang menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah ,olehnya itu peran kepala dinas dalam memberikan informasi keepada masyarakat terkait pengeloaan sampah perlu dilakukan

Berikut hasil bersama HA sebagai kepala Dinas UPT Bank Sampah

“Dalam pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Gowa melalui program Municipal Waste Recycling Project (MWRP) memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah melalui program ini dilakukan dengan beberapa tahap hingga samapai pada bank sampah yang nantinya akan didaur ulang lagi dan bisa menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat” ” (wawancara pada 6 Maret 2023)

Selanjutnya di sampaikan juga oleh MR Anggota Dinas UPT Bank Sampah

“Dalam memberikan informasi kepada masyrakat kami bertanggung jawab dalam memberikan edukasi beserta pemilihan sampah yang dapat diolah Kembali dan tidak dapat di olah Kembali masyarakat pun dapat langsung melakukan penyortiran langsung di Bank sampah yang nantinya kami akan membantu agar lebih mudah” (wawancara pada 6 Maret 2023)

Berikut Hasil wawancara Berikut hasil wawancara bersama DN Masyarakat

Kabupaten Gowa

“Alhamdulillah dalam memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat kami mudah mengerti dalam pemisahan sampah sampai pada tempat untuk ditimbang sampahnya (wawancara pada 6 Maret 2023)

Hal serupa disampaikan oleh DS Masyarakat Kabupaten Gowa

“ Bapak atau ibu dari dinas lingkungan selalu memantau atau mengumpulkan informasi dari masyarakat dan kemudian menindak lanjuti informasi yang didapat apalagi berkaitan dengan pengelolaan sampah yang menjadi keluhan masyarakat. Dalam menyampaikan pengelolaan sampah system daur ulang ini jaga mudah kami pahami dan kita teruskan kemasyarakat lainnya” (wawancara pada 6 Maret 2023)

Berikut hasil wawancar bersama DNO masyarakat Kabupaten Gowa

“Dalam mengarahkan atau memberikan informasi kepada kami baik itu soal harga yang dari hasil yang telah di pilih sebelumnya sangat mudah kami pahami ada juga papan informasi yang disediakan sehingga mempermudah kami untuk mengingat “ (wawancara pada 6 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada peran informasional pemerintah memberikan informasi yang mudah dipahami masyarakat bahkan turut ikut langsung dalam proses pengelolaan sampah.

Tabel 4.1. Daftar Harga Pembelian Sampah Anorganik UPT Bank sampah Kabupaten Gowa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa

No	Plastik	Contoh barang/Produk	Rp/Kg
	Gelas Bening bersih	Gelas plastik bening-tanpa penutup	Rp. 5000
	Gelas bening kotor	Gelas plastik warna bening-masih ada penutp	Rp.2.500

	Gelas warna	Ale-ale,mauntea,tehglas-disusun	Rp.2.500
	Gelas Campur	Segala jenis gelas plastic-campur	Rp. 2000
	Cincin Gelas	Cincin atau potongan bibir gelas	Rp. 2000
	Botol bening bersih	Botol ades,cocacola,fanta,floridina- tanpa tutup dan label	Rp. 2000
	Botol Biru Muda Bersih	Botol aqua,Js,Club, Dan Le Mineral	Rp.4000
	Botol Campur	Segala jenis botol tanpa label dan tutup	Rp.3.300
	Botol Warna Bersih	Botol minuman warna biru/hijau - tanpa penutup dan label	Rp.2.300
	Botol warna kotor	Botol minuman warna biru/hijau - tanpa penutup dan label	Rp.2.300
	Plastic pecah belah	Baskom,gelas,piring,kursi plastik (tanpa damar)	Rp.2.000
	Tutup botol	Tutup botol campur	Rp. 1.500
	Tutup galon	Tutup galon warna campur	Rp.2.000
	Plastik lembaran	Plastic lembaran berwarna bening	Rp. 500
	Botol plastic bergaris tengah	Botol plastic bergaris tengah (botol bedak,botol oli ,dsb)	Rp.1.800
	Plastik kemasan isi ulang	Refil minyak goreng,kemasan sachet	Rp.500

No	Logam	Contoh barang/produk	Rp/Kg
	Besi tebal	Besi cor, besi plat	Rp.2.000
	Besi tipis	Drum, rak piring	Rp 1.700
	Kaleng	Kaleng makanan-kaleng susu- tidak dipres	Rp.500
	Alumunium tipis	Kaleng minuman, fanta, sprite	Rp.7.000
	Besi seng	Seng bekas	Rp.500
No	Kertas	Contoh barang/produk	Rp/Kg
	Kertas putih	Buku tulis, kertas fotocopy	Rp.1.500
	Kertas campur/warna	Majalah, karton warna	Rp..500
	Kertas buram	Kertas warna buram	Rp.1000
	Kardus	Karton coklat box	Rp. 1.500
	Kertas semen A	Kertas semen tonasa	Rp.1000
	Koran	Koran berita	Rp. 1.200
	Karton Rak Telur	Rak untuk susun telur	Rp.500
No	Kaca/Botol	Contoh barang/produk	Rp/Kg
	Botol Leher Pendek bening	Botol markisa/bensin	Rp.1000
	Botol leher Panjang tebal	Botol kecap dan sejenisnya	Rp.500
	Botol tebal	Botol soda dan sejenisnya	Rp.300

3. Peran Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu hal yang sangat berisiko dan tidak mudah. Peranan yang membuat pemerintah terlibat dalam proses pembuatan strategi. Proses pembuatan strategi ini secara sederhana dinamakan sebagai suatu proses yang menjadikan keputusan-keputusan organisasi dibuat secara signifikan dan berhubungan. Peranan pengambilan keputusan oleh pemimpin merupakan peranan yang tidak boleh tidak harus dijalankan, lagi pula peranan ini yang membedakan antara manajer dengan pelaksana.

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pemerintah di dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Berikut hasil wawancara bersama HA sebagai kepala Dinas UPT Bank Sampah

“Pengambilan Keputusan pengelolaan sampah dengan program Pengelolaan Sampah(Mwrp) Kab Gowa tentunya tidak dilakukan secara sepihak tetapi berdasarkan kesepakatan bersama beserta melihat situasi yang berada di masyarakat dan juga program ini mudah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat”

Selanjutnya disampaikan MR Anggota Dinas UPT Bank Sampah

“Tentunya keputusan yang diambil berdasarkan hasil dari keputusan bersama dimana kami berpartisipasi menyuarakan pendapat, menerima dan mendengarkan semua masukan dan saran untuk nanti dipertimbangkan. bukan mengembalikan maunya (kehendak staff) apa, tetapi yang terbaik bagi kami seperti apa.” (wawancara pada 6 Maret 2023)”

Selanjutnya hasil wawancara bersama DS Masyarakat Kabupaten Gowa

“Alhmdulillah dengan adanya program ini dapat membantu dalam pengolahan sampah dan juga dapat membantu kami dalam pendapat pedapatan tambahan” (wawancara pada 6 Maret 2023)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada indikator pengambilan keputusan Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recyclllng Management Proqram) Kabupaten Gowa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat baik itu dapa segi perekonomian maupun pada kebersihan di Kabupaten Gowa.

C. Pembahasan

Setiap kota, termasuk kota yang sedang berkembang memiliki tantangan seperti pada tantangan tata kelola infrastruktur lingkungan. Tantangan tata kelola infrastruktur lingkungan meliputi air bersih, sanitasi, dan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat juga semakin tinggi. Akibatnya, jumlah timbulan sampah akibat aktivitas manusia juga semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan sampah lingkungan dengan tujuan utama untuk mengurangi sampah dan mendayagunakan sampah agar tidak menjadi barang yang benar-benar tidak berguna dan dibuang.

Anggapan sampah merupakan barang yang harus dibuang masih menjadi paradigma lama, padahal disisi lain pemanfaatan sampah dapat dijadikan sebagai bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan bakar dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah tersebut juga dapat dilakukan dari sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber timbulan sampah yang kemudian diawali dari pemisahan dan pemilahan.

Pengelolaan sampah di lingkungan di Kabupaten Gowa pengelolaan sampah melalui perbaikan teknologi pengolahan sampah melalui program Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycling Management Program) pada TPA dan peningkatan efektifitas pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPA, serta peningkatan kesadaran masyarakat maupun industri untuk mengurangi sampah melalui gerakan 4R (reuse, reduce, replace dan recycle).

Pada penelitian ini menggunakan teori Siagian, dengan menggunakan tiga indikator, yakni peran Antar Personal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan.

1. Peran Antar Personal

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui dinas Lingkungan Kabupaten Gowa melakukan hubungan interpersonal dengan yang masyarakat , dengan melakukan fungsi – fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan. Sejumlah kegiatan yang memperhatikan

peranan pemimpin ini termasuk pula merekrut, melatih, mengarahkan, memberi pujian, memberi kritik, mempromosikan, dan memberhentikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan melalui program (Municipal Waste Recycling Management Program) telah membangun hubungan yang baik terhadap masyarakat dengan memberikan arahan serta sosialisasi terkait pelaksanaan program tersebut.

Program Manajemen Pengelolaan Sampah di Gowa dirancang untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian dalam mengidentifikasi permasalahan, membuat perencanaan, menyediakan payung hukum, dan mengimplementasikan solusi yang efektif sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

2. Peran Informasional

Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah.

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah melalui program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycling Management Program) menginformasikan mengolah sampah dengan beberapa tahap sampai pada tahapan daur ulang

yang kemudian dapat di jadikan Kembali barang bernilai dan dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat.

Dalam operasionalisasinya Pengelolaan sampah MWRP mengedepankan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada tahap awal, untuk menarik minat masyarakat, program bank sampah diperkenalkan melalui aspek ekonomi yang merupakan sebuah alternatif pekerjaan dan memberikan peningkatan penghasilan khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak bekerja sekaligus merupakan sebuah upaya untuk merubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Namun, bagi masyarakat yang sudah memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap Bank Sampah, menjadi nasabah bank sampah merupakan sebuah komitmen untuk kelestarian lingkungan dan kedekatan sosial

3. Peran Pengambilan Keputusan

Untuk mengatasi permasalahan sampah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menekan angka peningkatan sampah yang bermuara pada tempat pembuangan akhir (TPA) Pemerintah Kabupaten Gowa melalui program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycling Management Program) dengan melakukan pemisahan jenis sampah kemudian mendaur ulang sampah yang dapat diolah kembali oleh masyarakat sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka Peran Pemerintah Kabupaten Gowa melalui program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycling Management Program) telah menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali, Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, bank sampah memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis.

B. Saran

Dalam rangka pengembangan program yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Gowa bank diperlukan adanya teknologi persampahan yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Terutama dalam bentuk sosialisasi, membantu pengembangan pengelolaan sampah di kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisona, R. D. (2018). Pengelolaan Sampah 3r (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran Ips Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan . *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (T.Thn.). Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia). *2021, 22*.
- Cavalli, F. M., Remke, M., Rampasek, L., Peacock, J., Shih, D. J., Luu, B., ... & Taylor, M. D. (2017).
- Fidela, A., Putra, H., Chairunnisa, N., Raihani, F., Andriani Sakinah Lubis, F., Adhiragil Kandyas, M., Amelia, R., & Rasyidpradana Ganda, G. (2020). Perancangan Tps Cipapais Sebagai Sarana Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang (Design Of Cipapais Twds As A Waste Management Facility In Kadumerak Village, Karang Tanjung District, Pandeglang Prefecture). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Juni, 2020(4), 540–548*.
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya. *Gava Media, 250*.
- Hartono, Widiasih, S., & Mary, I. (2020). Analisis Inovasi Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. *Reformasi Administrasi, 1*.
- Halim, L. F., & Feriadi, D. B. (2022). Pengelolaan Sampah Melalui Inovasi Daur Ulang Pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu “Mulyoagung Bersatu” Kabupaten Malang. *Seminar Keinsinyuran* .
- Halim, A. K. (2017). Pengelolaan Bank Sampah Dengna Berbasis R4 (Reduce,Reuse,Recycle,Replant) (Studi Kasus Di Sektor Iii Perumahan Bukit Mekar Wangi Kota Bogor).
- Ilyas, M. (2008). Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora, 1(2), 154–166*.

- Jati, K. T. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*.
- Juniartini, N. P. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *I(1)*.
- Pasande, P., & Ezra, T. (2021). Daur Ulang Sampah Di Desa Paisbuloli Sulawesi Tenggara. *Dinamisia*, 5.
- Purrohman, P. S., Universitas, D., & Prof, M. (2018). *Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Raintung, A., Sambrian, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1.
- Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 1.
- Setianigrum, R. B. (2018). Pengelolaan Sampah Dengan Pola 3 R Memperoleh Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat. *Jurnal Birokrasi*, 6.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). *Jurist-Diction*, 1(3), 933–948.
- Suhartani, L. D. (2020). Peran Lembaga Adat Tana Samawa (Lats) Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Di Kabupaten Sumbawa (Studi Di Desa Motong Kecamatan Utan).
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).







	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Tempat, Pergerakan, dan Kemajuan</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Widada Raya Lantai 5 - Jalan Sultan, Makassar No. 250 Makassar 90231 Telp. (0411) 864 872 Fax. (0411) 864 868 E-mail: fasil@unismuh.ac.id Official Web: http://fkip.unismuh.ac.id</small>
---	---	---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
 Nomor : 1345/SP/AS-M/VIH/1444/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Ali Imran, M

Stambuk : 10564110111

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi
 "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycling Management Program /WMP Kabupaten Gowa)"

Pembimbing I : Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II : Dr. Marsana, S.Sos., M.Pd

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara seriatna, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar,
 Pada tanggal : 01 September 2022

Dekan,

 Dr. Iqbal Fikri Malik, S.Sos., M.Si
 NIDN: 730-727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjenade No.5 Telp. (0411) 445377 Fax. (0411) 448926
 Website : <http://sarpap-new.sulselprov.go.id> Email : pspp@sulselprov.go.id
 Makassar 90221

Nomor:	1853/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran:	-	Bupati Gowa
Perihal:	<u>izin penelitian</u>	

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPTM UNISMUH Makassar Nomor : 267/05/C 4-VIII/1444/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama	ALI IMRAN M	
Nomor Pokok	105643101117	
Program Studi	Ilmu Pemerintahan	
Pekerjaan Lembaga	Mahasiswa IS	
Alamat	Jl. Sultan Abdullah Al-Qasbi Makassar	

Dimaksud untuk melakukan penelitian di instansi/lembaga/pejabat dalam rangka menyusun SKRIPSI dengan judul

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH PERKOTAAN (MUNICIPAL WASTERECYCLING MANEGEMEN PROGRAM) KABUPATEN GOWA *

Yang akan dilaksanakan pada : Tgl. 01 Februari s.d 01 Maret 2023

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di bawah ini sebagai izin penelitian.

Demi Nian Surat Keterangan ini dibenarkan agar dipertunjukkan sebagaimana mestinya

Dibahkan di Makassar,
Pada Tanggal 01 Februari 2023

A. H. GUSERHUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATUPINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S. LATIEP, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MAJYA
 No. : 13630424 198903 1 010

Ke Himpunan Yth
 1. Ketua LPTM/PTSPMUT Makassar di Makassar
 2. Perizinan

LEMBAGA PERPISTAKAAN DAN


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 E. Soela, Kualaala No. 211 Telp. 847722 Fax. 0411-842389 Makassar 90211 e-mail: opt@umh.ac.id

Nomor : 267/05/C.4-VIII/1/1444/2023
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 Rajab 1444 H
 31 January 2023 M

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Eq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 204/FSP/A.6-VIII/1/1444H/2023M tanggal 31 Januari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ALI AMRAN, M**
 No. Stambuk : **10564 1101117**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penelitian Skripsi dengan judul:

"Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycling Management Program) Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Februari 2023 s/d 3 April 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut dibenarkan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan jazakumallahu khaeran



Ketua L.P.3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM-101 7716



01-23



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 805/248/DPM-PTSP/PENELITIAN/01/2023
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa

di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 1053/S.01/PTSP/2023 tanggal $\{izin_tgl_permohonan\}$ tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **ALI IMRAN, M**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bontea Timur / 1 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Poltek : 105641101117
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Bontea Timur

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lemhaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM DAUR ULANG SAMPAH PERKOTAAN (MUNICIPAL WASTERECYCLING MANEGEMEN PROGRAM) KABUPATEN GOWA"

Selama : 1 Februari 2023 s/d 1 Maret 2023
 Pengikut :

Selubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada persinyawa kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Co. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menjadi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk kepastian pelaksanaan disingkat dituangkan dalam surat seperti ini.

Ditandatangani di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : $\{izin_tanggal_penetapan\}$



Ditandatangani secara elektronik oleh
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721626 199382 1 003

Tembusan Yth:

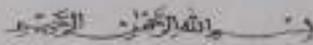
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua UPIM UNSMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REKORTRAK 248/DPM-PTSP/PENELITIAN/01/2023

1. Dokumen ini diterbitkan secara Resmi, Cetak berdasarkan data dari Pemohon, sehingga dalam sistem Sistem Cetak, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR/ISSN.




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor : Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 865572, 861193, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Air Imzan, M
NIM : 105641101117
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka Atas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	8 %	5 %

Diryatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana.

Makassar, 23 Juni 2023
Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90221
 Telepon (0411) 865872, 881 593, fax (0411) 865 588
 Website: www.library.umh.ac.id
 E-mail: perpustakaan@umh.ac.id

BAB I Ali imran. M

105641101117

by Tahap Tutup

Submission date: 23-Jun-2023 06:56AM (UTC+0700)
Submission ID: 2f21107848
File name: BAB_I_ALI_IMRAN105641117_REVISI_1.docx (20.05K)
Word count: 720
Character count: 4764

AB I Ali imran. M 105641101117

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	2%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id	Internet Source	3%
2	123dok.com	Internet Source	2%
3	Submitted to Unika Soeg	Student Paper	2%
4	id.123dok.com	Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB II Ali imran. M

105641101117

by Tanap Tutup

Submission date: 23 Jun 2023 06:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2121108525

File name: BAB_II_ALI_IMRAN_105641117_REVISI_1.docx (253.21K)

Word count: 3040

Character count: 20764

AB II All imran, M 105641101117

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	web.unefa.ac.id Internet Source	6%
2	research-reports.umh.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.stiebandasetia.ac.id Internet Source	3%
4	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	2%
6	docobook.com Internet Source	2%
7	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	2%
8	smartlib.umri.ac.id Internet Source	2%

LULUS
turnitin



BAB III Ali Imran. M 105641101117

ORIGINALITY REPORT

9%	6%	7%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	2%
2	Mahisa Distya Putri, Sudarmiani, Udin Kurniawan Aziz. "Peran Kader Keluarga Balita (BKB) dalam Kegiatan Balita (BKB) Teman Posyandu Masa Depan Kecamatan Balong Kabupaten EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajarannya, 2020 Publication	2%
3	scholar.unand.ac.id Journal Source	2%
4	Try Nur Handayani, M. Rizki Mauli, Nurdin Nurdin. "EKSPLORESI KEMAMPUAN REPRESENTASI VISUAL MAHASISWA CALON GURU DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GEOMETRI BERDASARKAN PEMAHAMAN MATEMATIKA DAN GENDER", Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, 2021 Publication	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches 0%

Exclude bibliography On

BAB IV Ali imran. M

105641101117

by Tahap Tutup



Submission date: 23 Jun 2023 06:53AM (UTC+0700)
Submission ID: 7121108251
File name: BAB_IV_ALI-IMRAN_105641101117_REVISE_1.docx (431.58K)
Word count: 3180
Character count: 20915





BAB V Ali imran. M 105641101117

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

on

Exclude matches

Exclude bibliography



Daftar Riwayat Hidup



Ali Imran. Lahir di Desa Pa'bundukang, Dusun Bontoa, kab Gowa, Juni 01 Tahun 1999, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Mansur Kilo dan ibu Marwa Kebo. Penulis mengawali Pendidikan formal pada tahun 2006 di SDN no. 186 inpres Bontoa lulus 2011 Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada tahun yang sama di SMP N 2 Bontonompo Selatan, lulus thn 2014 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 13 Gowa lulus tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tanggal 20 Juli 2023 Penulis dinyatakan lulus melalui ujian Kompherensif dan berhak menyangand gelar Sarjana Ilmu Politik.

